



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500;
Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-41/PB.6/2026 16 April 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi Pendapatan Satker Inaktif Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Keuangan/Biro Keuangan dan BMN/Biro Perencanaan/Pusat Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Lampiran I

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2026, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan monitoring data Aplikasi MyIntress, terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Pendapatan pada Satker Inaktif yang disebabkan transaksi tersebut dicatat menggunakan kode Satker Inaktif. TDK tersebut dapat diakses melalui menu Rekonsiliasi >> menampilkan data rekonsiliasi Satker Inaktif. Data detil terkait transaksi tersebut juga dapat diakses melalui tautan [s.id/Tinjut_Satker_Inaktif_2026](#);
2. Sehubungan hal di atas, untuk menyajikan pendapatan yang andal pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2026 dimohon Saudara agar segera menyelesaikan TDK Satker Inaktif tersebut setiap periodik sesuai periode rekonsiliasi laporan keuangan;
3. Selanjutnya disampaikan penjelasan tindaklanjut penyelesaian TDK pendapatan Satker Inaktif sebagai berikut:
 - a. Dalam hal K/L mengakui setoran PNBPNBP, agar menyampaikan usulan koreksi setoran PNBPNBP tersebut kepada KPPN mitra/Dit.APK sesuai format pada tautan (lampiran II). Selanjutnya KPPN mitra/Dit.APK melalui KPPN Khusus Penerimaan akan melakukan koreksi setoran PNBPNBP pada Satker Inaktif menjadi PNBPNBP pada Satker Aktif/Satker Pengampu;
 - b. Dalam hal K/L tidak mengakui setoran PNBPNBP, agar menyampaikan usulan koreksi setoran yang tidak diakui kepada KPPN mitra/ Dit.APK sesuai format pada tautan (lampiran III). Selanjutnya KPPN mitra/Dit.APK melalui KPPN Khusus Penerimaan melakukan koreksi setoran PNBPNBP pada Satker Inaktif menjadi setoran PNBPNBP lain-lain (akun 425999) BA BUN 999.99 pada Satker Suspen 999984;
 - c. Dalam hal Satker Inaktif dapat menindaklanjuti, maka penyampaian usulan koreksi setoran PNBPNBP dilakukan oleh Satker Inaktif kepada KPPN mitra;
 - d. Dalam hal Satker Inaktif tidak dapat menindaklanjuti, maka penyampaian usulan koreksi setoran PNBPNBP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. Satker Aktif/Satker Pengampu menyampaikan usulan koreksi kepada KPPN Mitra; atau
 - II. Eselon I K/L menyampaikan usulan koreksi kepada Dit.APK untuk diteruskan kepada KPPN Khusus Penerimaan.
 - e. Setiap usulan koreksi setoran PNBPNBP agar dilampiri surat pernyataan tanggungjawab koreksi PNBPNBP sebagaimana lampiran IV.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujihastuti

Tembusan:

1. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



No.	Kementerian/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum RI
14.	Kementerian Hak Asasi Manusia RI
15.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
16.	Kementerian Keuangan RI
17.	Kementerian Pertanian RI
18.	Kementerian Perindustrian RI
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
20.	Kementerian Perhubungan RI
21.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
22.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
23.	Kementerian Kebudayaan
24.	Kementerian Kesehatan RI
25.	Kementerian Agama RI
26.	Kementerian Haji dan Umrah RI
27.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
28.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
29.	Kementerian Sosial RI
30.	Kementerian Kehutanan RI
31.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI
32.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
33.	Kementerian Pekerjaan Umum RI
34.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
35.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI
36.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan RI

37.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
38.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI
39.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan RI
40.	Kementerian Pariwisata RI
41.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
42.	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
43.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
44.	Kementerian Koperasi RI
45.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI
46.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
47.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI
48.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
49.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
50.	Badan Intelijen Negara
51.	Badan Siber dan Sandi Negara
52.	Badan Pusat Statistik
53.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
54.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
55.	Perpustakaan Nasional
56.	Kementerian Komunikasi dan Digital RI
57.	Kepolisian Negara RI
58.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
59.	Lembaga Ketahanan Nasional
60.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
61.	Badan Narkotika Nasional
62.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI
63.	Kementerian Transmigrasi RI
64.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
65.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
66.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
67.	Komisi Pemilihan Umum
68.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
69.	Badan Informasi Geospasial
70.	Badan Standardisasi Nasional
71.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
72.	Lembaga Administrasi Negara
73.	Arsip Nasional RI
74.	Badan Kepegawaian Negara
75.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
76.	Kementerian Perdagangan RI
77.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

78.	Komisi Pemberantasan Korupsi
79.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
80.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
81.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
82.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
83.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
84.	Ombudsman RI
85.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
87.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
88.	Badan Pengawas Pemilu
89.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
90.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
91.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
92.	Badan Keamanan Laut
93.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
94.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
95.	Badan Pangan Nasional
96.	Otorita Ibu Kota Nusantara
97.	Badan Karantina Indonesia
98.	Badan Gizi Nasional

DAFTAR KOREKSI SETORAN YANG DIAKUI SEBAGAI PNBP K/L

No.	Satker Inaktif		Kode KPPN	Kode Akun	NTPN	Tgl. Buku	Nilai	Satker Aktif	
	BA/Eselon I	Kode Satker						BA/Eselon I	Kode Satker
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

<kota>, <tanggal bulan tahun>

<tanda tangan>

<nama>

Lampiran III
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor : S-41/PB.6/2026
Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR SETORAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI PNBP K/L

No.	BA/Eselon I	Kode Satker	Kode KPPN	Kode Akun	NTPN	Tgl. Buku	Nilai
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

<kota>, <tanggal bulan tahun>

<tanda tangan>

<nama>

<<KOP SURAT>>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa koreksi PNBP sebagaimana daftar terlampir, dan seluruh perubahan data PNBP tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<kota>, <tanggal bulan tahun>

<tanda tangan bermaterai>

<nama>